

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANGGA KENCANA KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Yogi Adya Utomo, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman : www.fisip.undip.ac.id email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan mempersulit usaha pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menurunkan angka pertumbuhan penduduk, BKKBN menerbitkan sebuah program berupa program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan program Bangga Kencana dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, dan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya Sumber Daya Manusia dan Finansial yang menghambat keberlangsungan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa tujuan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk yaitu menurunkan angka pernikahan usia dini, menurunkan 4 Terlalu, Menurunkan Angka Kelahiran, Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, dan Menurunkan *Unmeetneed*. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. BKKBN disarankan dapat lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Finansial yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang agar tidak menghambat kinerja PLKB, PPKBD, dan kader TPK sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Bangga Kencana, Keluarga Berencana

**POLICY IMPLEMENTATION STUDY OF BANGGA KENCANA PROGRAM
FAMILY PLANNING IN GENUK DISTRICT, SEMARANG CITY.**

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that has problems in reducing poverty. The continuous increase in the population will hinder the government's efforts in improving the well-being of the people. In an effort to reduce population growth, BKKBN has published a program of Family Development and Family Planning. (Bangga Kencana). The aim of this study is to study the implementation of the policy of Bangga Kencana program and to analyze the factors – factors that influence the implementing of the policy of Bangga Kencana Program in the Genuk district. This research is qualitative. Data is collected through in-depth interviews and observations, and data analysis uses qualitative descriptive techniques. The results of this study showed a lack of human and financial resources that hindered the sustainability of Bangga Kencana Program in the Genuk District, Semarang City. It can be concluded that the goal of Bangga Kencana Program in Genuk district is to reduce the number of early marriages, to reduce 4 too, to lower the birth rate, to decrease the death rate of mothers and children, and to reduce unmetneed. The driving and hindering factors of Bangga Kencana Program in Genuk district, Semarang City are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. BKKBN is suggested to increase the human and financial resources managed by the People's Control Service and KB Semarang City so as not to hinder the performance of PLKB, PPKBD, and TPK cadres so that this program can be implemented well.

Keywords: Implementation, Bangga Kencana, Family Planning.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Namun kendala utama yang dihadapi oleh negara berkembang hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,25%, menurun prosentase dari sebelumnya pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 237,63 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49% pertahun. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan mempersulit usaha pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar pula usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Langkah pemerintah dalam mengatasi jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat adalah dengan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana merupakan program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur usia perkawinan pasangan baru, mengatur jarak kehamilan antar anak, serta memberitahu jumlah anak ideal dalam suatu keluarga.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tujuan Peraturan Pemerintah pelaksanaan program KB adalah penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program KB adalah bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.

Sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan

kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan terpadu dalam rangka mencapai keluarga berkualitas, keluarga sejahtera.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta KB Provinsi Jawa Tengah

ALAT KONTRASEPSI	2020	2021	PERSENTASE
IUD	447.567	419.097	-6.36
MOW	232.244	222.844	-4.05
MOP	25.658	22.017	-14.19
KONDOM	133.920	146.018	9.03
IMPLAN	659.332	617.177	-6.39
SUNTIK	2.747.053	2.600.427	-5.34
PIL	511.948	480.608	-6.12
JUMLAH PESERTA KB	4.757.722	4.508.188	-5.24
JUMLAH PUS	6.525.048	6.408.024	-1.79

Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2021

Program keluarga berencana (KB) merupakan program jangka panjang karena dampaknya baru bisa dirasakan di kemudian hari. Kini, program KB di Jawa Tengah belum menunjukkan hasil yang baik. Pemahaman masyarakat terhadap program KB yang semakin baik belum menjadikan angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Pelaksanaan KB di Kota Semarang untuk menekan angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Pada

tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk di angka 1,57%, dan di tahun 2020 persentase laju pertumbuhan berada di angka 0,59%.

Dalam upaya menurunkan angka pertumbuhan penduduk, BKKBN menerbitkan sebuah program berupa program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Program Bangga Kencana merupakan suatu gerakan yang utuh untuk merencanakan keluarga mulai dari fase dalam kandungan, bayi, balita, anak – anak, remaja, dewasa hingga lansia. Program Bangga Kencana meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program yang menyeluruh ini merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya keluarga dan mengurangi angka pertumbuhan penduduk di Kota Semarang.

Program Pelembagaan dan Informasi Program KB Kota Semarang membutuhkan dukungan dari petugas pengelola operasional program meliputi :

- a. Jumlah PLKB / PKB : 45 orang
- b. Jumlah PPKBD / SKD : 177 orang
- c. Jumlah Sub PPKBD : 1.476 orang
- d. Jumlah Kelompok KB : 10.046 orang
- e. Toga / Toma Aktif KIE KB : 288 orang

Dengan cakupan petugas operasional lini lapangan tersebut dalam pengelolaan kegiatan

operasional, terjadi kendala terutama dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dimana idealnya 1 (satu) orang PLKB mengampu 2 (dua) wilayah kelurahan. Namun, pada kenyataannya 1 orang PLKB mengampu 3 sampai 5 wilayah kelurahan, yang menjadikan program Bangga Kencana tidak bisa berjalan efektif dikarenakan kurangnya tenaga lapangan dalam melaksanakan penyuluhan antar kelurahan di Kota Semarang.

Hasil capaian program Bangga Kencana tahun 2020 dan penetapan parameter kependudukan tahun 2021 yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Parameter Program Bangga Kencana Tahun 2020-2021

No	PARAMETER	2020	Target 2021
1	TFR	2,00%	2,00%
2	CPR/PA	76,94%	78,00%
3	DO	12,16%	11,40%
4	UNMETNEED	10,32%	7,00%
5	PENURUNAN PUS ISTRI UMUR <20TAHUN	0,49%	0,50%
6	KEAKTIFAN ANGGOTA BINA KELUARGA	47,63%	45,84%

Sumber : Disdalduk & KB Kota Semarang tahun 2021

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Genuk pada tahun 2019 sebanyak 22.012 dan tahun 2020 sebanyak 22.281,

PUS yang termasuk resiko tinggi di Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pasangan Usia Subur Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Kelurahan	PUS Usia < 20 Th		PUS Usia > 35 Th	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Sembungharjo	88	87	1457	1648
2	Kudu	37	37	1560	1681
3	Karangroto	7	13	2475	2569
4	Genuksari	4	8	2387	2231
5	Banjardowo	4	0	1318	1318
6	Gebangsari	4	2	622	628
7	Trimulyo	0	0	600	322
8	Penggaron Lor	3	4	828	877
9	Muktiharjo Lor	82	109	432	639
10	Bangetayu Kulon	11	9	2558	2533
11	Bangetayu Wetan	18	5	2285	2426
12	Terboyo Kulon	0	1	70	66
13	Terboyo Wetan	1	0	176	163
TOTAL		259	275	16768	17101

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN Kecamatan Genuk Tahun 2019-2020

Selanjutnya dapat dilihat bahwa PUS dengan resiko tinggi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Wanita yang termasuk kelompok umur dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun sangatlah beresiko tinggi saat mereka hamil dan pasca salin, resiko tersebut bisa terjadi ke ibu maupun anak yang lahir.

Kondisi yang terjadi di Kecamatan Genuk tidak berbeda jauh sebagaimana yang terjadi di lingkup kota, partisipasi masyarakat pada program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk juga masih jauh dari harapan. Berdasarkan data dari Disdalduk menyatakan bahwa angka Pasangan Usia Subur (PUS) yang berisiko tinggi di Kecamatan Genuk masih cukup tinggi, seperti PUS dibawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun. Berdasarkan diskripsi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini akan meneliti secara mendalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana, dengan judul : **“Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana Keluarga Berencana Studi Kasus Kecamatan Genuk Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk ?
2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat implementasi program Bangga Kencana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implementasi program Bangga Kencana dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan Genuk.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor yang mendorong dan menghambat

implementasi kebijakan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk.

D. Kajian Teori

Konsep Administrasi Publik

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Dimock dan Dimock (1992: 20) menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan

cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi bagaimana melakukannya.

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.”

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah interpretasi pemerintah dalam bentuk manajemen yang memanfaatkan sumber daya yang ada guna melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang berupa sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yaitu terpenuhinya kebutuhan publik.

Kebijakan Publik

Menurut Singadilaga (2001: 5) Kebijakan publik merupakan :

1. Kebijakan publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu;
2. Pelaku kebijakan adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam

posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya;

3. Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi menurut **Merilee S. Grindle (1980)** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci;
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut **George C. Edwards III (1980)**, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari

setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks dan akan menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut **Cheema dan Rondinelli (1983)**, ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni :

- 1) Kondisi lingkungan;
- 2) Hubungan antar organisasi;
- 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program;
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Keluarga Berencana

Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat punya program KB yang disebut dengan *Planned Parenthood*.

Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Wujud dari program

Keluarga Berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda/mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan:

- (1) Kondom;
- (2) Pil KB;
- (3) IUD;
- (4) Suntik;
- (5) KB implant / susuk;
- (6) Vasektomi dan tubektomi (KB permanen).

Pada awalnya (tahun 1970-an) Keluarga Berencana (KB) merupakan Program pemerintah murni dengan titik tekan pada pengendalian penduduk melalui penggunaan alat kontrasepsi, konsep yang dikembangkan melalui pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dengan slogan cukup dua anak, laki-laki perempuan sama saja. Setelah disahkannya Undang undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera, kendatipun substansinya sebenarnya tidak berbeda jauh. Pengertian Keluarga Berencana menjadi “Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui; (1) Pendewasaan usia perkawinan, (2) Pengaturan kelahiran, (3) Peningkatan ketahanan keluarga, dan (4) Peningkatan kesejahteraan keluarga”. Keluarga Berencana tidak lagi menjadi program yang terkesan dipaksakan, KB menjadi gerakan masyarakat yang semakin

dibutuhkan karena konsep NKKBS mendapatkan tanggapan positif.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Situs penelitian dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Genuk Kota Semarang. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bangsa Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang

1. Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini

Maraknya kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Genuk disebabkan oleh berbagai faktor. Perekonomian suatu keluarga merupakan salah satu penyebab pernikahan usia dini, hal tersebut terjadi untuk meringankan beban orang tua dengan cara menikahkan anaknya dengan orang mampu agar bisa mendongkrak

perekonomian keluarga tersebut.

Faktor yang lainnya adalah perkembangan teknologi yang memudahkan semua orang khususnya anak dibawah umur untuk mengakses film porno dan akhirnya banyak anak dibawah umur melakukan tindak asusila yang menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan.

PLKB Kecamatan Genuk dalam rangka mengurangi angka pernikahan usia dini menerapkan program Generasi Berencana (GenRe) dan membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Fokus kegiatan program GenRe yaitu mengajak para remaja berperilaku sehat dan berakhlak. PLKB perlu menyediakan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya (PIK Remaja/Mahasiswa) sehingga tidak terjebak narkoba, HIV/AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

PIK Remaja merupakan suatu wadah dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa di Kecamatan Genuk guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok / wadah kegiatan yang

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja. Kedua wadah tersebut diharapkan mampu menunjang program GenRe yang bertujuan memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (*healthy and ethical life behaviors*) untuk mencapai ketahanan remaja (*adolescent resilience*) sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana.

Sasaran bagi program Genre yaitu :

- a. Remaja (10-24tahun) dan belum menikah;
- b. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah;
- c. Keluarga / keluarga yang mempunyai remaja;
- d. Masyarakat peduli remaja

Tabel 3.4

Jumlah Calon Pengantin Kecamatan Genuk

No	Kelurahan	Sasaran Catin	Catin yang Didampingi	Usia < 20 Th
1	Sembungharjo	3	3	3
2	Kudu	15	15	15
3	Karangroto	12	12	12
4	Genuksari	55	55	55
5	Banjardowo	16	16	16
6	Gebangsari	1	1	1
7	Trimulyo	3	3	3
8	Penggaron Lor	4	4	4
9	Muktiharjo Lor	0	0	0
10	Bangetayu Kulon	6	6	6
11	Bangetayu Wetan	8	8	8
12	Terboyo Kulon	0	0	0
13	Terboyo Wetan	0	0	0
TOTAL		123	123	123

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN Kecamatan Genuk tahun 2022

Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) juga penting di sosialisasikan ke masyarakat dengan harapan angka Pernikahan Usia Dini dapat berkurang. PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan diharapkan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Alasan mengapa 20 tahun ke atas agar calon pengantin sudah matang dalam hal medis, fisik, mental spiritual, ekonomi sosial, dan bekal yang lebih baik bahkan resiko kematian ibu waktu melahirkan dapat berkurang. Sosialisasi PUP yang dilakukan oleh

PLKB dan PPKBD Kecamatan Genuk dalam rangka mengurangi PUS dengan kelompok umur dibawah 20 tahun menjadikan PUS yang hendak melangsungkan pernikahan mendapatkan ilmu penting mengenai bahaya dan dampak jika menikah dibawah umur 20 tahun, sehingga angka pernikahan usia dini di setiap kelurahan dapat berkurang.

2. Menurunkan 4 Terlalu (Terlalu Muda Hamil, Terlalu Tua Hamil, Terlalu Dekat Jarak Kehamilan, Terlalu Banyak Anak)

Pemberian edukasi mengenai kehamilan seorang ibu sangatlah penting bagi kelahiran dan tumbuh kembang anak. Banyak resiko yang terjadi jika seorang ibu tidak didampingi dengan baik oleh kader KB disetiap wilayah, dampak dari jarak kelahiran yang tidak ideal adalah melonjaknya angka kematian ibu dan anak mengalami stunting karena kurangnya pemenuhan gizi bagi bayi tersebut.

Pasangan Usia Subur khususnya wanita dapat dikategorikan resti (resiko tinggi) apabila :

- a. Terlalu Muda Hamil
- b. Terlalu Tua Hamil
- c. Terlalu Dekat Jarak Kehamilan
- d. Terlalu Banyak Anak

Tabel 3.5

Jumlah Ibu Hamil di Kecamatan Genuk

No	Kelurahan	Sasaran Bumil	Bumil yang Didampingi	Usia > 35 Th & < 20 Th
1	Sembungharjo	32	32	8
2	Kudu	35	35	2
3	Karangroto	96	90	17
4	Genuksari	62	62	9
5	Banjardowo	62	62	7
6	Gebangsari	7	7	1
7	Trimulyo	20	20	1
8	Penggaron Lor	25	25	2
9	Muktiharjo Lor	13	11	1
10	Bangetayu Kulon	101	86	11
11	Bangetayu Wetan	67	56	6
12	Terboyo Kulon	3	3	0
13	Terboyo Wetan	3	3	0
TOTAL		526	492	65

Sumber : C1 Kecamatan Genuk Bulan April 2023

Berdasarkan tabel diatas, bumil pada kelompok usia dibawah 20 tahun (terlalu muda hamil) dan kelompok usia diatas 35 tahun (terlalu tua hamil) termasuk kategori kehamilan resiko tinggi berjumlah 65 orang. Bumil resiko tinggi yang terdata selanjutnya akan mendapatkan perhatian khusus dan dibina dengan baik oleh kader TPK sehingga meminimalisir dampak buruk bagi ibu dan anak.

Pendampingan bagi pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu pasca salin sangat penting dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan mencegah anak mengalami stunting.

KIE yang diadakan oleh PLKB dan PPKBD sangat diperlukan untuk menurunkan kehamilan yang tidak ideal. PLKB Kecamatan Genuk juga sering mengingatkan bagi masyarakat yang mengikuti program Bangga Kencana mengenai 3 Terlambat yang sangat membahayakan bagi keselamatan ibu dan anak. 3 Terlambat yang dimaksud antara lain terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pertolongan medis yang akurat.

3. Menurunkan Angka Kelahiran

Pemahaman baik masyarakat mengenai keluarga yang ideal dan berkualitas menjadikan angka kelahiran perlahan mulai berkurang. Masyarakat mulai memahami dampak dan resiko yang terjadi jika sebuah keluarga memiliki anak yang terlalu banyak dengan jarak kelahiran yang berdekatan.

PLKB Kecamatan Genuk bekerja sama dengan puskesmas dan PMB untuk menerima dan melayani PUS yang hendak ber-KB. Pemasangan KB gratis dan adanya uang transportasi bagi peserta KB menjadikan masyarakat mulai antusias untuk memasang alkon seperti Implan, IUD, dan MOP/MOW

karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan KB suntik yang berbayar setiap 1-3 bulan sekali mulai menyadari manfaat jenis alkon yang lain dengan jangka waktu yang lebih lama.

4. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak

Pasangan Usia Subur yang berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun saat ini menjadi perhatian khusus bagi PLKB Kecamatan Genuk untuk diberi pengetahuan mengenai resiko tinggi bagi ibu dan anak. Pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kecamatan Genuk untuk memberikan penyuluhan bagi orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas demi meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS. Kader KB dan PPKBD yang terdapat di setiap wilayah dapat memberikan arahan dan mendampingi seluruh masyarakat untuk memahami peran orang tua dalam pembinaan balita dan konsep diri orang tua. Dalam penyuluhan BKB, orang tua akan diberikan pembelajaran mengenai

poin – poin penting dalam membina tumbuh kembang anak, antara lain :

- a. Tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya;
- b. Tidak menuntut anak secara berlebihan, melebihi kemampuannya;
- c. Memenuhi kebutuhan akan ASI, ASAH, dan ASUH;
- d. Tidak merendahkan kekurangan anak, melainkan tetap memberikan dorongan padanya;
- e. Meningkatkan komunikasi dengan anak melalui pesan yang ikhlas;
- f. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya dan menjadi pendengar yang baik;
- g. Menjadi teladan yang baik bagi anak.

5. Menurunkan *Unmeetneed*

Unmeetneed merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mempunyai 2 anak maupun lebih yang tidak ingin memiliki anak lagi dan tidak mengikuti program KB. Menurunkan *Unmeetneed* di lingkup masyarakat sulit terlaksana dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan oleh suami yang masih dipegang teguh oleh Pasangan Usia Subur.

Tabel 3.6 Jumlah PUS *Unmeetneed* Kecamatan Genuk Tahun 2023

No	Kelurahan	PUS <i>Unmeetneed</i>	
		Maret	April
1	Sembungharjo	611	596
2	Kudu	394	387
3	Karangroto	870	854
4	Genuksari	472	473
5	Banjardowo	497	488
6	Gebangsari	113	113
7	Trimulyo	77	77
8	Penggaron Lor	241	235
9	Muktiharjo Lor	120	120
10	Bangetayu Kulon	862	1090
11	Bangetayu Wetan	843	824
12	Terboyo Kulon	29	29
13	Terboyo Wetan	47	47
TOTAL		5176	5333

Sumber : C1 Kecamatan Genuk Kota Semarang

Peningkatan jumlah PUS *Unmeetneed* di Kecamatan Genuk menunjukkan bahwa masyarakat saat ini masih mempercayai penggunaan KB tradisional dibanding menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan antar anak.

Upaya sosialisasi dan mengadakan pelayanan KB gratis baik di puskesmas maupun PMB yang terlatih menjadikan masyarakat awam memahami tentang apa kegunaan KB bagi PUS. PLKB dan kader KB wajib memberikan KIE

(Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga masyarakat memahami dampak positif KB dan benar – benar mantap dalam ber-KB.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang

1. Faktor Pendorong

Komunikasi

Komunikasi dapat dikatakan baik apabila mampu menciptakan koordinasi yang baik. Penyampaian komunikasi yang baik juga menghasilkan implementasi yang baik. Untuk dapat mencapai koordinasi dan implementasi yang baik, diperlukan penyaluran informasi yang jelas antar implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan. Namun, kenyataan dilapangan sering terjadi penyampaian komunikasi yang salah pengertian atau miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.

Pola komunikasi dalam implementasi program Bangga Kencana yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang dan PLKB Kecamatan Genuk berjalan dengan baik karena komunikasinya

sampai kepada masyarakat yang ingin mengikuti KB. Sosialisasi yang dilakukan oleh PLKB untuk menarik minat masyarakat dalam bek-KB melalui media massa, media elektronik, maupun penyampaian KIE oleh kader KB di setiap wilayah.

Pemanfaatan mobil keliling KB oleh PLKB Kecamatan Genuk merupakan salah satu upaya untuk memberikan sosialisasi dengan mengumumkan adanya pelaksanaan pemasangan KB gratis di puskesmas maupun PMB, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui adanya program KB gratis bisa ikut serta dalam pelaksanaan tersebut.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang sudah dibentuk. Prosedur Operasi Standar (SOP) dibuat untuk memandu individu dalam implementasi kebijakan sebagai pedoman agar tujuan kebijakan terpenuhi tanpa penyimpangan. Pengawasan yang lemah bagi struktur birokrasi dan prosedur yang rumit dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak berjalan efektif dan fleksibel. SOP yang dibentuk oleh PLKB Kecamatan Genuk antara lain meminta para PPKBD untuk

mengumpulkan laporan kegiatan setiap tanggal 20 tiap bulannya dan melakukan pertemuan tiap awal bulan untuk membahas laporan kegiatan dan evaluasi setiap kegiatan. Pertemuan yang diadakan setiap bulan ini cukup efektif mengingat permasalahan yang ada di lapangan tiap bulannya selalu berbeda.

Agenda kegiatan yang sudah dibentuk dan disepakati bersama menjadikan pelaksanaan program Bangga Kencana menjadi lebih terarah dan jelas. Persebaran kader KB dan kader TPK di setiap wilayah dapat meringankan dan melancarkan kegiatan program Bangga Kencana yang meliputi pembinaan dan pendampingan bagi setiap masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Sumber Daya

Pelaksanaan program tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Aspek tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan, karena tanpa adanya kesadaran dari para implementor tentang pentingnya sumber daya, dapat dipastikan kebijakan tersebut akan berjalan lambat dan terhambat.

Sumber Daya Finansial akan menjamin keberjalanan sebuah kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial didalam sebuah kebijakan, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya finansial berguna dalam menunjang biaya kegiatan sosialisasi mengenai program Bangga Kencana, pembuatan banner untuk sosialisasi, uang transportasi bagi peserta, dan lain-lain. Honor bagi PPKBD dan kader TPK tidaklah sebanding dengan pekerjaan dan pendampingan di masyarakat yang sangatlah banyak.

Kendala SDM menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB selain kendala anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan jumlah penyuluh KB untuk melaksanakan program Bangga Kencana menjadikan program ini belum terlaksana dengan baik sesuai target capaian karena luasan daerah yang tidak diimbangi dengan jumlah penyuluh KB. Penyuluh KB idealnya mengampu 1 hingga 2 kelurahan di setiap kecamatan, pada kenyataannya penyuluh KB saat ini mengampu 3 sampai 5 kelurahan di setiap kecamatan dan menyebabkan pelaksanaan program Bangga Kencana kurang optimal.

Disposisi

Sikap pelaksana atau disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor sebuah kebijakan. Karakter yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan kejujuran akan diberikan kemudahan ketika menemui hambatan ketika proses implementasi. Apabila implementor program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang mempunyai komitmen yang tinggi, maka proses implementasi akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika implementor tidak memiliki komitmen yang tinggi maka implementasi program Bangga Kencana tidak dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, tindakan implementor, dan komitmen implementor.

Sikap PLKB Kecamatan Genuk dalam program Bangga Kencana sangatlah baik mengingat permasalahan yang terjadi di Kecamatan Genuk termasuk salah satu yang tinggi diantara kecamatan lainnya yang ada di Kota

Semarang. PLKB berupaya memberikan kemudahan bagi PPKBD yang memiliki asepor (masyarakat yang hendak ber-KB) untuk membebaskan masyarakat melakukan pemasangan KB di 3 Praktek Mandiri Bidan maupun 2 puskesmas. Kemudahan inilah yang menjadikan masyarakat mulai mengikuti program Bangga Kencana tanpa harus berpatokan dengan tanggal pelayanan yang rutin diadakan setiap bulan.

Sikap baik yang ditunjukkan oleh PLKB Kecamatan Genuk saat ini berbanding terbalik dengan sikap PPKBD dan kader TPK dikarenakan honor yang biasanya dibayarkan dengan tertib, saat ini belum dibayarkan dari bulan Maret. Hal ini menjadikan kinerja PPKBD dan kader TPK untuk memberikan pembinaan dan pendampingan untuk masyarakat menurun.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk yaitu untuk menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini, menurunkan 4 Terlalu (Terlalu

Muda Hamil, Terlalu Tua Hamil, Terlalu Dekat Jarak Kehamilan, Terlalu Banyak Anak), menurunkan Angka Kelahiran, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, dan menurunkan *Unmetneed* (masyarakat yang tidak ikut serta program KB).

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang, maka peneliti akan memberi saran yaitu :

1. BKKBN dapat lebih meningkatkan sumber daya finansial yang dikelola oleh Disdalduk KB Kota Semarang agar tidak menghambat kinerja PPKBD dan kader TPK.
2. Karena keterbatasan jumlah penyuluh, BKKBN dapat melakukan rekrutmen agar program ini dapat terlaksana dengan baik sesuai target capaian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT., selaku dosen pembimbing 1, Bapak Drs. AUFARUL MAROM, M.Si selaku dosen pembimbing 2, Bapak Drs. Ari Subowo, MA dan Ibu Dra. Maesaroh, M.Si selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Buku

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Pustaka Setia. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfa Beta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jurnal dan Sumber Lainnya

Undang – Undang no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah no 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Data Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Semarang Bulan Juni 2021.

Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik.

Rencana Strategis BKKBN tahun 2020-2024.

Okey Marcellus I, Ogonnaya Eze O, Arinze Emmanuel O. 2017. *Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria*

Elisabeth Udiu R, Hendrik Toda, Catryn V. Adam. 2022. Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

Ika I, Sarah S, Neni K. 2018. Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

M. Ali, M Junaidi, Abdul Hafiz. 2019. Implementasi Program Desa Keluarga

Berencana Bagi Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Geguntur Mataram.

Rahmat, Umi C, Sri Artati W. 2019. Implementasi Program Keluarga Berencana “Emas” Oleh Dppkb Dalam Menekan Jumlah Penduduk Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sakiman Hidayat A, Dyah Ayu P, M. Solihin. 2022. Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kota Batam.

Siti Nunung N, Euis Susanti. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kabupaten Kuningan.

Wahyu P, Okky Bagus A. 2020. Implementasi Program Pembangunan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualitas Keluarga Di Kecamatan Kranggan, Temanggung.

Widya Febriyani T, Mayasari, Maulana Rifai. 2020. Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.